

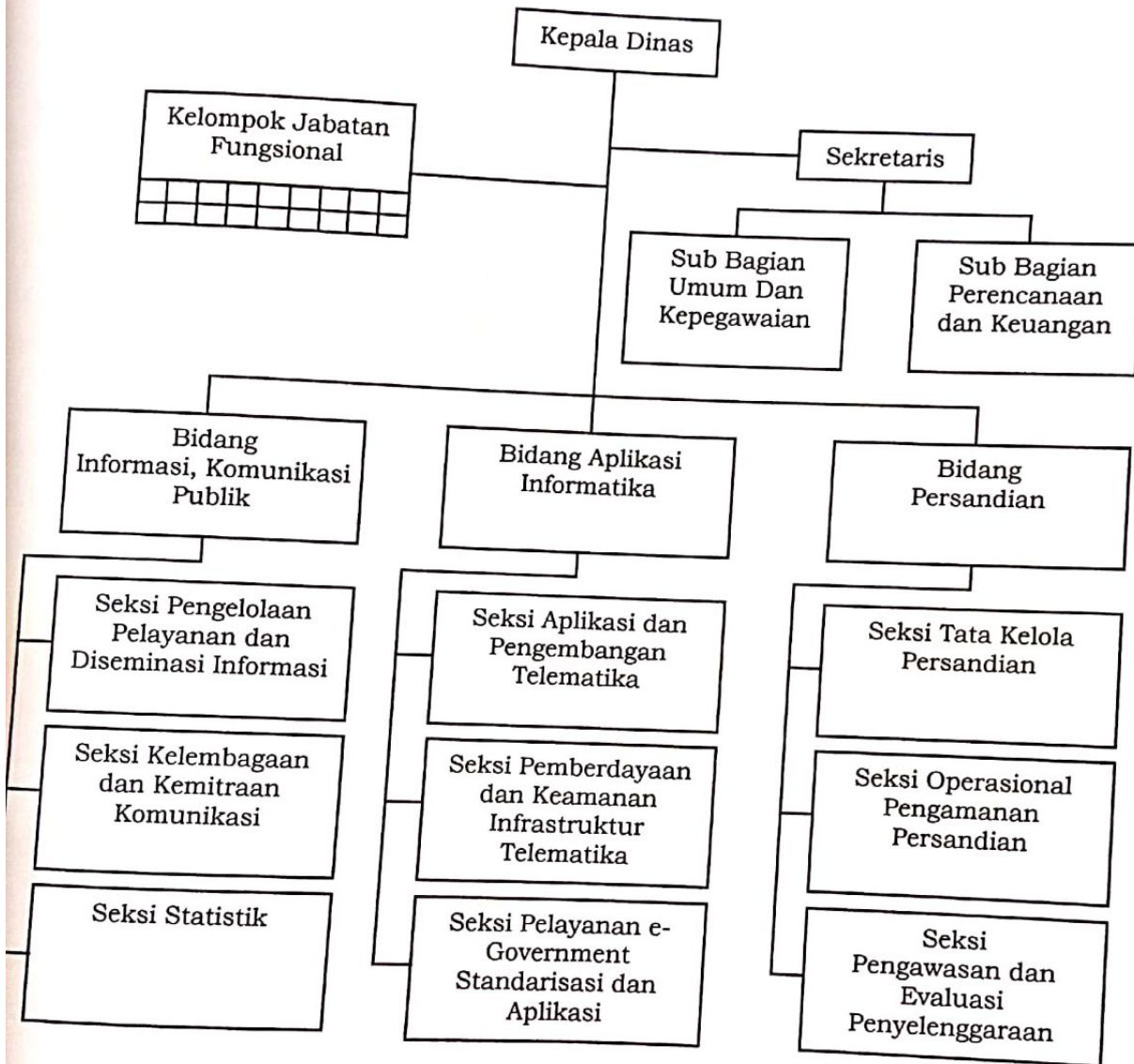
- e. penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- f. penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- g. penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- h. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- i. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- j. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. pengamanan informasi elektronik;
- l. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- n. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman dan fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS); Dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

4.3 Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah. Yang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- b. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah propinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan propinsi;
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman dan fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS); dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016-2021

2.2. Sumber daya Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini berkedudukan menempati kantor yang beralamat di jalan Raya Padang Panjang kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 didukung oleh 36 orang pegawai/karyawan yang terdiri dari 29 Pns dan 7 Orang PHL, Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	-
2	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tingkat I	III/d	4
5	Penata	III/c	7
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	8
7	Penata Muda	III/a	4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/c	2
10	Penata Muda Tk.I	II/b	-
11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru	I/c	1
JUMLAH			29

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

ENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016-2021

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	4
2.	Strata 1 (S 1)	18
3.	Diploma 3 (D 3)	2
4.	SLTA / SMK	5
Jumlah		29

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 4 orang , Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) jumlah 18 pegawai , untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang, sedangkan untuk SLTA/SMK berjumlah 5 pegawai .

3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	2
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	IV	4
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	-

Untuk Menunjang Kegiatan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika melengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung kantor, Kendaraan Inventaris dan Fasilitas lainnya. Dimana tanah, bangunan gedung kantor untuk sementara menempati salah satu kantor yang ada di lingkungan Sekretariat Kabupaten Bengkulu Selatan, Sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik/rusak berat. Dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika baru berdiri karena adanya Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka asset atau barang belum terdata, dimana asset masih bergabung di Dinas Pariwisata dan belum di mutasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga peralatan atau sarana dan prasarana yang digunakan sekarang masih seadanya dan masih menggunakan sarana pinjaman dari Instansi lain.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, Good Government tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya Teknologi Informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidak siapan dalam memahami peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government (e – government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta melakukan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tertuang dalam Renstra 2016-2021.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2017 dapat ditunjukkan melalui Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam melakukan segala urusan dikantor Dinas Komunikasi dan Informatika, serta meningkatkan volume pelayanan kepada masyarakat. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat sehingga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat di Bengkulu Selatan.

RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016-2021

2. Meningkatnya keselarasan dan Sinkronisasi informasi dan komunikasi antara Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika serta masyarakat di Bengkulu Selatan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan media informasi sebagai bahan untuk memperoleh pengetahuan mengenai perkembangan dan potensi di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Namun peningkatan kualitas pelayanan dalam pemerintahan dan pembangunan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan pembiayaan dalam pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas Pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber dana untuk peningkatan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat terutama di pedesaan;
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas serta kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Kurangnya Sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat terutama untuk menjangkau desa yang terpencil.
5. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menerima informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan jaringan internet.
6. Tingkat pendidikan pengetahuan masyarakat masih relatif rendah.

2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugasnya untuk lima tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyampaikan beberapa Sasaran Strategis yang ada kaitannya dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Tersedianya dan tersebarnya informasi yang factual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI.
2. Terlaksananya pemberdayaan untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat,
3. Mengembangkan system komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan local.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 – 2021 mengemukakan beberapa sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

- a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media
- b. Terlaksananya pemberdayaan potensi lembaga komunikasi masyarakat
- c. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan keterampilan bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat.
- d. Tersedianya aplikasi pendukung e-government
- e. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
2. Lemahnya jaringan informasi
3. Masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan (blank Spot) dan jaringannya masih rendah (low Spot)
4. Adaptasi perkembangan TIK lambat.
5. Belum terintegrasinya proses perencanaan reguler dengan perencanaan

**RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016-2021**

keprogram di Organisasi Perangkat Daerah.

6. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan dari instansi yang berkompeten di Bengkulu Selatan
7. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan tersebut.

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.
2. Adanya berbagai ragam media informasi.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
4. Wawasan dan Pengetahuan masyarakat meningkat
5. Dukungan Pemerintah Daerah dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah dengan Perencanaan yang terintegrasi.
6. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
7. Ketersediaan dan kesanggupan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
8. Pengembangan pelayanan informasi dengan cara meningkatkan dengan pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) di tingkat Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dan akan di sosialisasikan untuk adanya PPID di setiap SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika, masih ditemui kendala serta permasalahan yang dihadapi dan perlu untuk di atasi, antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepada masyarakat masih belum memadai;
2. Tenaga dan pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi tingkat pendidikan maupun kemampuan masih rendah;
3. Jumlah pegawai masih kurang
4. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
5. Disiplin dan motivasi pegawai masih rendah.
6. Belum optimalnya pemanfaat jaringan komunikasi antar OPD atau e-government yang telah di pasang
7. Sistem komunikasi yang tersedia belum di manfaatkan secara optimal
8. Masih adanya beberapa daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak terjangkau sinyal komunikasi (blank spot).
9. Masih adanya beberapa daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang sinyal komunikasi lemah (low spot).
10. Belum terbentuknya KIM (Komunitas Informasi Masyarakat)

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi pelayanan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat maka peningkatan kualitas SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pemerintahan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.